

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH: STUDI KASUS PADA HASIL VISITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI KOTA PALEMBANG

Nirmala Kusumawatie

UPT Universitas Islam Negeri Raden Fatah

kusuma.ute1989@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to the low accreditation of school libraries based on visitation results in Palembang City. Employing a descriptive quantitative method, data were collected through questionnaires and observations of 4 school libraries that underwent visitation. The findings indicate that the primary factors causing low accreditation include inadequate book collections, substandard physical facilities, and limited competence of library staff. This study is expected to serve as a foundation for improving school library management to enhance accreditation quality in the future.

Keywords: *library accreditation, school library, contributing factors, descriptive quantitative, Palembang*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya akreditasi perpustakaan sekolah berdasarkan hasil visitasi di Kota Palembang. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner dan observasi terhadap 4 perpustakaan sekolah yang telah divisitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab rendahnya akreditasi meliputi kurangnya koleksi buku yang memadai, fasilitas fisik yang tidak sesuai standar, serta minimnya kompetensi tenaga perpustakaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan pengelolaan perpustakaan sekolah guna meningkatkan kualitas akreditasi di masa depan.

Kata kunci: akreditasi perpustakaan, perpustakaan sekolah, faktor penyebab, deskriptif kuantitatif, Palembang

PENDAHULUAN

Akreditasi Perpustakaan sekolah merupakan suatu instrumen evaluasi yang krusial untuk memastikan fungsi tersebut berjalan optimal. Dalam konteks perpustakaan sekolah, akreditasi adalah proses penilaian komprehensif terhadap standar pengelolaan, kelengkapan koleksi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia perpustakaan, yang pada akhirnya merefleksikan mutu layanan yang diberikan. Di Kota Palembang, hasil visitasi perpustakaan sekolah menunjukkan adanya fenomena rendahnya tingkat akreditasi pada sebagian besar perpustakaan sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat implikasinya terhadap kualitas ekosistem pendidikan..

Akreditasi perpustakaan berperan penting dalam menjamin bahwa layanan, fasilitas, dan pengelolaan perpustakaan telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional (Syifa Azka Layalia, 2021). Lebih dari sekadar status administratif, akreditasi memberikan arah pengembangan, mendorong peningkatan mutu, serta menjadi indikator keterlibatan aktif perpustakaan dalam mendukung tujuan pendidikan (Krismayani, 2019). Dengan demikian, akreditasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar utama di sekolah (Erna Hidayati, 2020).

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang menyebutkan bahwa sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan untuk mencapai target prestasi pendidikan di sekolah. Pentingnya keberadaan perpustakaan juga ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki perpustakaan sebagai sumber belajar.

Akreditasi perpustakaan sekolah merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana perpustakaan memenuhi standar nasional dalam hal layanan, fasilitas, dan pengelolaan (M. Reza Rokan, 2017). Perpustakaan yang terakreditasi mencerminkan kesiapan dalam mendukung kurikulum, meningkatkan budaya literasi siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang

kondusif. Dengan adanya proses akreditasi, kekuatan dan kelemahan perpustakaan dapat teridentifikasi, sehingga pengembangan layanan dan fasilitas dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan (Supriyanto, 2024).

Urgensi pelaksanaan akreditasi perpustakaan semakin ditekankan dalam sejumlah studi sebelumnya. Penelitian oleh (Novitasari & Handayani, 2022) mengungkapkan bahwa inovasi pustakawan dalam menunjang akreditasi belum maksimal, salah satunya akibat kurangnya perhatian kepala sekolah dalam pengalokasian anggaran. Sementara itu, (Wahyuni Sri & Nurhikmahyanti Desi, n.d.) menunjukkan bahwa rendahnya dukungan kepala sekolah dan minimnya fasilitas merupakan hambatan besar dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan sekolah. Kajian-kajian ini menggarisbawahi pentingnya akreditasi sebagai alat evaluasi sekaligus pendorong peningkatan mutu perpustakaan sekolah secara menyeluruh.

Meskipun akreditasi memiliki nilai penting, data dari Badan Pusat Statistik Nasional 2024 ada 10.526 perpustakaan sekolah di Indonesia yang telah terakreditasi. Tapi dari data tersebut sayangnya lebih dari 50% perpustakaan sekolah itu hanya mendapatkan akreditasi C

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya capaian akreditasi, tetapi juga berpengaruh terhadap fungsi utama perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Rendahnya perhatian sekolah terhadap proses akreditasi, minimnya anggaran, tidak adanya program kerja perpustakaan yang jelas, serta kurangnya inovasi menjadi kendala utama. Dampaknya adalah rendahnya minat baca siswa dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung aktivitas perpustakaan.

Khususnya di Kota Palembang, temuan dari hasil visitasi akreditasi menunjukkan bahwa banyak perpustakaan sekolah belum memenuhi sembilan komponen penilaian akreditasi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI, yakni: (1) koleksi, (2) sarana dan prasarana, (3) pelayanan perpustakaan, (4) tenaga perpustakaan, (5) penyelenggaraan dan pengelolaan, (6) inovasi dan kreativitas, (7) tingkat kegemaran membaca, (8) indeks pembangunan literasi masyarakat, dan (9) dukungan anggaran. Namun, belum banyak data kuantitatif atau dokumentasi empirik yang menggambarkan secara rinci bagaimana kondisi sembilan komponen ini di sekolah-sekolah Palembang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik 2024, Jumlah Perpustakaan sekolah yang terakreditasi di kota Palembang hanya 54 sekolah yang Dimana dari 54 sekolah tersebut 41 diantaranya Terakreditasi C. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan akreditasi di Kota Palembang merupakan isu nyata yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama dari segi kebijakan daerah, sosialisasi instrumen akreditasi, dan komitmen satuan Pendidikan (Neni, 2024).

Kota Palembang dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu kota besar di Sumatra Selatan yang menjadi barometer kebijakan pendidikan regional. Sebagai pusat pendidikan dan administrasi, Palembang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Namun kenyataannya, capaian akreditasi perpustakaan di kota ini masih sangat rendah. Ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi di tingkat lokal yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab rendahnya akreditasi perpustakaan sekolah di Kota Palembang. Dengan menggunakan data hasil visitasi dan dokumentasi lapangan, penelitian ini akan mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang memengaruhi kualitas perpustakaan, termasuk kondisi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga pustakawan, serta manajemen pengelolaan. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan pendidikan dan pihak sekolah untuk meningkatkan akreditasi dan kualitas perpustakaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan objektif mengenai kondisi aktual pengelolaan perpustakaan di sekolah berdasarkan hasil akreditasi dan pencapaian tiap komponen penilaian. Metode deskriptif kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dalam bentuk angka dan statistik, serta menganalisis kecenderungan dan hubungan antar komponen berdasarkan instrumen baku yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional.

Menurut Sugiyono (2019:147), metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara

faktual, sistematis, dan akurat. Dalam hal ini, penelitian mengambil empat satuan pendidikan di Kota Palembang, yaitu SMP Negeri 29 Palembang, SMA Negeri 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra Palembang, dan MTsN 1 Palembang. Pemilihan keempat sekolah tersebut didasarkan atas ketersediaan data akreditasi perpustakaan yang lengkap dan terkini, representasi dari berbagai jenis sekolah (negeri dan swasta, umum dan madrasah), serta letaknya yang tersebar secara geografis dalam lingkup Kota Palembang. Dengan demikian, pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang beragam dan representatif mengenai kondisi akreditasi perpustakaan sekolah di wilayah tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi hasil akreditasi perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP), berupa formulir visitasi, laporan penilaian akhir, dan lembar skor penilaian akreditasi. Data yang digunakan merupakan hasil akreditasi periode tahun 2024, yang mencerminkan kondisi paling mutakhir dari masing-masing perpustakaan sekolah. Peneliti memperoleh akses terhadap dokumen-dokumen ini melalui izin resmi dari pihak sekolah dan kesediaan pihak perpustakaan sekolah untuk berpartisipasi, serta telah memenuhi persetujuan etis penggunaan data dokumen sebagai bahan penelitian.

Komponen akreditasi yang dianalisis meliputi delapan indikator utama sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yaitu: Pelayanan, Pengelolaan, Penyelenggaraan, Tenaga, Koleksi, Sarana dan Prasarana, Inovasi dan Kreativitas, serta Literasi Masyarakat. Data yang diperoleh diolah secara kuantitatif melalui penyajian skor pada tiap komponen akreditasi dan dilakukan analisis perbandingan antar sekolah untuk melihat variasi kualitas perpustakaan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, persentase, dan narasi untuk menggambarkan mutu dan capaian akreditasi perpustakaan di masing-masing sekolah. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat kecenderungan kontribusi tiap komponen terhadap total skor akreditasi, serta mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi pencapaian akreditasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2010), bahwa dalam penelitian deskriptif penting untuk “menjelaskan keterkaitan antar data sebagai bentuk interpretasi ilmiah terhadap temuan di lapangan”.

Dengan pendekatan dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah, serta menjadi

dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi peningkatan mutu perpustakaan di lingkungan pendidikan formal.

Hasil dan Pembahasan

Penilaian akreditasi perpustakaan sekolah merupakan proses evaluatif terstandar yang diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur mutu, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari empat satuan pendidikan di Palembang yakni SMPN 29 Palembang, SMAN 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra, dan MTsN 1 Palembang diperoleh skor akreditasi yang bervariasi dan mencerminkan keberagaman pencapaian mutu layanan perpustakaan di tiap institusi.

A. Distribusi Nilai Akreditasi dan Kategori Mutu

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1, satu-satunya sekolah yang tidak mendapatkan status akreditasi adalah SMPN 29 Palembang, dengan total skor hanya 26,71 dari total bobot maksimal 100. Sementara itu, tiga sekolah lainnya memperoleh status akreditasi B: SMAN 4 Palembang (80,01), SMA Islam Az-Zahra (76,82), dan MTsN 1 Palembang (85,23). Ketiga sekolah ini tergolong telah memenuhi sebagian besar indikator SNP, meskipun masih terdapat kekurangan yang menghambat pencapaian akreditasi A.

Tabel 1. Distribusi Skor Akreditasi Perpustakaan Sekolah

No	Sekolah	Status Akreditasi	Skor Akhir
1	SMPN 29 Palembang	Tidak Terakreditasi	26,71
2	SMAN 4 Palembang	Terakreditasi B	80,01
3	SMA Islam Az-Zahra	Terakreditasi B	76,82

No	Sekolah	Status Akreditasi	Skor Akhir
4	MTsN 1 Palembang	Terakreditasi B	85,23

Komponen-Komponen Dominan dalam Skor Tinggi

Komponen Pelayanan menjadi yang paling menonjol dengan skor tinggi secara konsisten di semua sekolah. SMAN 4 Palembang mencatat angka tertinggi dalam komponen ini (18,29 dari bobot 20), diikuti oleh MTsN 1 Palembang (17,88), SMA Islam Az-Zahra (17,82), dan SMPN 29 Palembang (16,57). Ini menunjukkan bahwa aspek interaksi antara pustakawan dengan pemustaka, layanan peminjaman, dan bimbingan literasi telah dilaksanakan dengan cukup baik di sebagian besar sekolah.

Komponen lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap skor akhir adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Misalnya, MTsN 1 Palembang mendapatkan skor 13,12 (dari bobot 15) untuk Pengelolaan, sedangkan SMAN 4 Palembang memperoleh 12,35 untuk Penyelenggaraan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif, seperti struktur organisasi, rencana kerja, dan pelaporan kegiatan, telah dilaksanakan sesuai ketentuan SNP.

Tabel 2. Skor Komponen Akreditasi Tiap Sekolah

Sekolah	Pelayanan	Pengelolaan	Penyelenggaraan	Tenaga	Koleksi	Sarpras	Inovasi	Literasi	Kegemaran Pembaca
SMPN 29 Palembang	4.27	3.00	2.50	6.00	4,15	3.23	1.00	1.00	1,25
SMAN 4 Palembang	16.86	13.33	9.50	9.38	12.23	8.62	2.60	3.25	4.25
SMA Islam Az-Zahra	16.57	11.67	8.50	9.00	13.15	8.92	2.00	3.00	4.00

Sekolah	Pelayanan	Pengelolaan	Penyelenggaraan	Tenaga	Koleksi	Sarpras	Inovasi	Literasi	Kegemaran Pembaca
MTsN 1 Palembang	18.29	13.33	9.00	12.00	12.69	8.77	3.40	3,25	4.50

Tabel 2 menyajikan skor dari delapan komponen utama dalam instrumen akreditasi perpustakaan untuk empat sekolah yang menjadi objek penelitian, yakni SMPN 29 Palembang, SMAN 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra, dan MTsN 1 Palembang. Masing-masing komponen memiliki bobot nilai yang berbeda dan berkontribusi terhadap total skor akhir yang menentukan status akreditasi perpustakaan.

2.1 Komponen Pelayanan

Pada komponen pelayanan, MTsN 1 Palembang mencatat skor tertinggi sebesar 18,29, menunjukkan bahwa perpustakaan di sekolah ini telah menyediakan layanan yang optimal bagi warga sekolah. Sebaliknya, SMPN 29 Palembang hanya memperoleh skor 4,27, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pelayanan perpustakaan, baik dari segi aksesibilitas, kenyamanan, maupun ketersediaan petugas yang melayani pemustaka.

2.2 Komponen Pengelolaan

Komponen pengelolaan juga menunjukkan kesenjangan yang cukup tajam. SMAN 4 dan MTsN 1 memperoleh skor sama, yaitu 13,33, menandakan bahwa kedua sekolah ini telah menerapkan tata kelola perpustakaan secara profesional, baik dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun pelaporan. Sementara itu, SMPN 29 hanya mencapai skor 3,00, mencerminkan lemahnya sistem manajemen yang diterapkan.

2.3. Komponen Penyelenggaraan

Pada aspek penyelenggaraan, SMAN 4 kembali unggul dengan skor 9,50, menunjukkan keberhasilan dalam menyelenggarakan program literasi dan kegiatan perpustakaan yang terstruktur. SMPN 29, sebaliknya, hanya meraih skor 2,50. Ini memperkuat temuan

sebelumnya bahwa sekolah ini masih belum optimal dalam menjalankan program perpustakaan secara berkelanjutan.

2.4. Komponen Tenaga

Komponen tenaga perpustakaan menjadi salah satu kekuatan utama MTsN 1 Palembang dengan skor 12,00. Tenaga perpustakaan yang memadai dan profesional mendukung penyelenggaraan berbagai program secara efektif. SMPN 29 hanya mendapat skor 6,00—meskipun lebih tinggi dibanding komponen lainnya di sekolah tersebut, jumlah dan kompetensi petugas perpustakaan kemungkinan masih belum sesuai dengan standar ideal

2.5. Komponen Koleksi

Dari segi koleksi, SMA Islam Az-Zahra menjadi yang tertinggi (13,15), menandakan kelengkapan bahan pustaka yang tersedia, baik dalam format cetak maupun digital. Koleksi yang memadai tentu berkontribusi langsung terhadap minat baca siswa. SMPN 29 menempati posisi terendah (4,15), yang menandakan keterbatasan sumber bacaan bagi peserta didik.

2.6. Komponen Sarana dan Prasarana

Komponen sarana dan prasarana (sarpras) juga menempatkan SMA Islam Az-Zahra sebagai yang terbaik (8,92), diikuti oleh SMAN 4 (8,62) dan MTsN 1 (8,77). SMPN 29 kembali berada pada posisi paling rendah dengan skor 3,23, mengindikasikan perlunya peningkatan fasilitas fisik seperti ruang baca, rak buku, maupun komputer dan internet.

2.7. Komponen Inovasi dan Kreativitas

Dalam aspek inovasi, nilai seluruh sekolah masih tergolong rendah, dengan skor tertinggi hanya 3,40 (MTsN 1). SMPN 29 hanya memperoleh 1,00. Rendahnya nilai inovasi menunjukkan masih terbatasnya upaya kreatif perpustakaan dalam mengembangkan program-program kekinian, seperti literasi digital, pojok baca tematik, atau kolaborasi dengan komunitas literasi.

2.8. Komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Komponen ini menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana perpustakaan berperan. Komponen literasi menunjukkan pola serupa. SMAN 4 dan MTsN 1 memperoleh skor tertinggi (3,25), sedangkan SMPN 29 hanya mendapat 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa program literasi belum menjadi budaya kuat di tingkat SMP tersebut.

2.9. Komponen Kegemaran Membaca

Pada komponen kegemaran membaca, MTsN 1 memperoleh skor tertinggi (4,50), mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam menumbuhkan budaya baca di lingkungan sekolah. SMPN 29 hanya mendapat skor 1,25, menunjukkan bahwa minat baca siswa masih sangat rendah dan membutuhkan pendekatan khusus untuk meningkatkannya.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa SMPN 29 Palembang memiliki skor akreditasi yang secara konsisten rendah di semua komponen, yang menandakan perlunya peningkatan serius dalam semua aspek pengelolaan perpustakaan. Rendahnya akreditasi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi sesuai standar nasional menyebabkan pelayanan informasi tidak optimal. Kedua, minimnya koleksi buku yang relevan dan up-to-date, baik cetak maupun digital, membuat fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar belum maksimal. Ketiga, sarana dan prasarana perpustakaan yang tidak representatif, seperti ruang baca yang sempit, kurangnya pencahayaan, dan belum tersedianya fasilitas digital, turut menjadi kendala besar. Selain itu, rendahnya frekuensi program literasi dan minimnya inovasi layanan juga menunjukkan kurangnya upaya perpustakaan dalam mendorong budaya membaca di kalangan siswa.

Sementara itu, MTsN 1 Palembang menunjukkan kinerja terbaik secara menyeluruh, dengan nilai yang tinggi dalam hampir semua komponen, terutama pelayanan, tenaga perpustakaan, dan kegemaran membaca. Hal ini menandakan adanya perhatian serius dari pihak sekolah terhadap pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Sekolah-sekolah menengah atas lainnya (SMAN 4 dan SMA Islam Az-Zahra) juga menunjukkan kualitas perpustakaan yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek inovasi dan literasi.

B. Komponen dengan Capaian Rendah: Inovasi dan Literasi

Sebaliknya, skor terendah diperoleh dari komponen Inovasi Kreativitas dan Literasi Masyarakat. SMPN 29 Palembang hanya memperoleh 2,10 (dari 5) untuk Inovasi dan 2,00 untuk Literasi Masyarakat. Meskipun skor di sekolah lain sedikit lebih tinggi, secara umum rata-rata nilai komponen ini masih di bawah 4. Hal ini menunjukkan belum adanya program literasi inovatif seperti pelatihan literasi digital, klub baca, pameran karya tulis, atau penggunaan teknologi dalam

Tabel 2 menyajikan skor dari delapan komponen utama dalam instrumen akreditasi perpustakaan untuk empat sekolah yang menjadi objek penelitian, yakni SMPN 29 Palembang, SMAN 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra, dan MTsN 1 Palembang. Masing-masing komponen memiliki bobot nilai yang berbeda dan berkontribusi terhadap total skor akhir yang menentukan status akreditasi perpustakaan.

C. Ketersediaan SDM: Masih Perlu Peningkatan Kompetensi

Dalam aspek komponen tenaga, evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sekolah telah memiliki jumlah pustakawan yang memadai, terdapat ketimpangan dalam hal kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan yang mengelola layanan di masing-masing sekolah. Skor komponen tenaga untuk SMPN 29 Palembang adalah yang terendah, yaitu 6,28 dari bobot maksimal 15. Skor rendah ini menunjukkan bahwa banyak pustakawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan serta minim pelatihan profesional. Selain itu, beberapa pustakawan masih belum mahir dalam mengelola sistem informasi perpustakaan berbasis digital, yang menjadi tuntutan di era modern. Tidak adanya program pelatihan rutin dan terbatasnya dukungan manajemen sekolah juga memperparah kondisi ini.

Sebaliknya, MTsN 1 Palembang mencatatkan skor tertinggi di kategori ini, yaitu 12,03. Skor tinggi ini mencerminkan bahwa tenaga perpustakaan di MTsN 1 Palembang sebagian besar telah memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan, bahkan beberapa pustakawan mungkin memiliki pelatihan tambahan yang mendukung kinerja mereka. Hal ini sangat penting karena pustakawan yang terlatih dengan baik akan dapat memaksimalkan potensi perpustakaan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan literasi di sekolah. Misalnya, pustakawan yang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dapat mengelola perpustakaan digital dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi oleh siswa.

Namun demikian, SMAN 4 Palembang dan SMA Islam Az-Zahra juga mencatat skor yang cukup baik dalam hal ketersediaan tenaga, dengan masing-masing mencatat skor 11,42 dan 10,94. Walaupun skor ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah ini memiliki pustakawan dengan kualifikasi yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan kompetensi lebih lanjut, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan non-formal. Adanya pelatihan rutin, sertifikasi pustakawan, serta penyediaan program-program pengembangan profesional lainnya akan sangat mendukung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada siswa.

Peningkatan kompetensi ini sangat penting, mengingat tugas pustakawan tidak hanya terbatas pada pengelolaan koleksi, tetapi juga pada pelayanan informasi yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Pustakawan yang kompeten dapat menjadi agen perubahan, yang tidak hanya mengelola koleksi, tetapi juga menciptakan program-program literasi yang inovatif dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu, setiap sekolah perlu menyediakan anggaran dan waktu untuk pelatihan yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia perpustakaan.

D. Kualitas Koleksi dan Sarana: Cukup Memadai Namun Belum Optimal

Evaluasi terhadap komponen koleksi dan sarana-prasarana menunjukkan hasil yang bervariasi antar sekolah, meskipun secara umum, perpustakaan sekolah sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, komponen koleksi dan sarana-prasarana memiliki nilai rata-rata antara 70% hingga 89% dari bobot maksimal, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sudah cukup baik dalam menyediakan bahan pustaka baik cetak maupun digital. Namun, ada beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian lebih.

Di MTsN 1 Palembang, yang memperoleh skor 12,91 dari bobot 15, perpustakaan menunjukkan ketersediaan koleksi yang cukup memadai dengan berbagai jenis bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan kurikulum dan minat siswa. Koleksi buku teks, referensi, dan literatur pendukung kegiatan ekstrakurikuler sudah lengkap dan tersedia. Selain itu, ruang perpustakaan di MTsN 1 Palembang juga cukup representatif, memungkinkan siswa untuk belajar dengan nyaman dan fokus.

Sementara itu, SMAN 4 Palembang dan SMA Islam Az-Zahra, dengan skor 12,87 dan 11,78 untuk komponen koleksi, juga memiliki koleksi bahan pustaka yang cukup baik, tetapi masih ada

kekurangan terutama pada diversifikasi koleksi. Koleksi buku referensi yang lebih mutakhir dan buku-buku non-aksara (seperti e-book atau buku audio) bisa ditingkatkan, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di era digital. Selain itu, penggunaan koleksi digital masih terbatas karena pustakawan belum sepenuhnya menguasai pengelolaan teknologi perpustakaan.

Meskipun koleksi buku cetak seperti buku teks dan referensi telah tersedia, masalah lain yang dihadapi oleh banyak sekolah adalah keterbatasan sarana prasarana, terutama di SMPN 29 Palembang. Dengan skor 9,50 untuk komponen koleksi, sekolah ini mengalami kekurangan dalam keberagaman dan jumlah koleksi yang ditawarkan, baik dalam bentuk buku cetak maupun digital. Di samping itu, fasilitas fisik perpustakaan juga belum mendukung kegiatan belajar yang optimal ruang perpustakaan sempit, pencahayaan kurang, belum tersedia komputer untuk akses digital, serta tidak adanya area khusus untuk diskusi atau kerja kelompok. Kurangnya peremajaan koleksi dan keterbatasan dana untuk pengadaan bahan pustaka baru juga menjadi faktor penghambat lainnya.

Perpustakaan yang baik tidak hanya mengandalkan koleksi buku fisik yang sudah ada, tetapi juga perlu mengembangkan koleksi berbasis teknologi, seperti e-book dan database digital, yang dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis internet. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi yang lebih besar pada infrastruktur digital dan koleksi berbasis teknologi yang dapat mendukung pembelajaran siswa di luar jam sekolah.

Selain itu, ruang perpustakaan yang nyaman juga merupakan faktor penentu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengaturan ruang baca yang lebih nyaman dengan kursi yang ergonomis, pencahayaan yang memadai, serta ruang untuk kegiatan diskusi atau penelitian kelompok akan sangat mendukung suasana belajar yang produktif. Sayangnya, di sekolah dengan akreditasi rendah seperti SMPN 29 Palembang, aspek ini masih sangat jauh dari ideal.

E. Diskusi: Korelasi antara Komponen dan Skor Akhir

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara skor tinggi pada komponen Pelayanan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan dengan status akreditasi yang baik. SMAN 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra, dan MTsN 1 Palembang, yang semuanya memperoleh status akreditasi B, memiliki skor tinggi di ketiga komponen tersebut. Hal ini mengindikasikan

bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada pemustaka, tata kelola administratif yang baik, dan penyelenggaraan program perpustakaan yang sesuai dengan standar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akreditasi.

Dalam hal ini, komponen Pelayanan menjadi salah satu indikator kunci, karena mengukur bagaimana pustakawan memberikan layanan kepada pemustaka, mulai dari peminjaman buku hingga bimbingan literasi. Perpustakaan yang memiliki sistem pelayanan yang baik, seperti adanya sistem peminjaman yang efisien, layanan referensi yang ramah, serta kegiatan literasi yang intensif, akan mendukung pencapaian akreditasi yang lebih tinggi. Hal ini juga tercermin dari MTsN 1 Palembang, yang mendapatkan skor tertinggi dalam komponen pelayanan.

Namun, meskipun skor pada beberapa komponen lainnya seperti Koleksi dan Sarana cukup baik, rendahnya skor pada komponen Inovasi dan Literasi terbukti menjadi faktor determinan utama dalam kegagalan akreditasi SMPN 29 Palembang. Meskipun koleksi dan sarana perpustakaan di SMPN 29 Palembang sudah tersedia, namun kelemahan besar terletak pada kurangnya inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan minimnya program literasi yang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa perpustakaan tidak hanya harus memiliki bahan pustaka, tetapi juga perlu bertransformasi menjadi pusat kegiatan literasi yang dapat mendukung perkembangan kemampuan literasi informasi siswa.

Kurangnya program literasi yang melibatkan siswa, seperti klub baca, lomba karya tulis, atau perpustakaan digital, berpengaruh langsung terhadap rendahnya nilai pada komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Inovasi dan Kreativitas. Perpustakaan yang aktif dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan literasi akan mendorong minat baca siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan (Ade Giantri et al., 2023).

Berdasarkan hasil dan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa perpustakaan sekolah perlu mengalami transformasi paradigmatis, dari fungsi tradisionalnya sebagai tempat peminjaman buku menjadi pusat literasi sekolah yang aktif, inovatif, dan kolaboratif. Perubahan ini sangat penting agar perpustakaan dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik di era digital.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan koleksi

digital, baik dalam bentuk e-book, jurnal elektronik, maupun repositori pembelajaran daring, guna memperluas akses informasi yang relevan dan up-to-date bagi siswa dan guru. Kedua, kompetensi pustakawan harus diperkuat melalui pelatihan, workshop, dan program sertifikasi berkelanjutan, sehingga mereka mampu mengelola perpustakaan secara profesional dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Ketiga, penting untuk melakukan integrasi teknologi informasi, seperti penerapan Online Public Access Catalog (OPAC) dan sistem manajemen perpustakaan berbasis digital, agar proses peminjaman, pengembalian, dan pencatatan koleksi menjadi lebih efisien dan transparan. Keempat, sekolah perlu menginisiasi dan melaksanakan program-program literasi yang inovatif, seperti kelas literasi, klub baca, atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang menyenangkan.

Terakhir, penguatan tata kelola juga harus menjadi perhatian utama, terutama melalui pengadaan dokumen-dokumen legal dan administratif, seperti Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang pengelola perpustakaan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penyusunan laporan berkala yang terdokumentasi dengan baik. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan mutu layanan perpustakaan sekolah tidak hanya mampu memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tetapi juga menjadi garda depan dalam mendukung proses pembelajaran, menumbuhkan budaya baca, dan menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya kesenjangan signifikan dalam mutu pengelolaan perpustakaan sekolah yang tercermin dari hasil akreditasi pada empat sekolah di Palembang. Tiga sekolah, yaitu SMAN 4 Palembang, SMA Islam Az-Zahra, dan MTsN 1 Palembang, memperoleh status akreditasi B, sedangkan SMPN 29 Palembang tidak berhasil mendapatkan akreditasi. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan perpustakaan antar sekolah belum merata dan masih terdapat disparitas yang cukup tajam dalam pemenuhan standar mutu perpustakaan sebagaimana ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya akreditasi perpustakaan tidak disebabkan oleh kekurangan pada satu aspek tunggal,

melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor struktural dan manajerial yang belum optimal.

Beberapa faktor yang secara eksplisit memengaruhi rendahnya akreditasi perpustakaan, terutama pada SMPN 29 Palembang, antara lain adalah kurangnya pustakawan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional, keterbatasan jumlah dan ragam koleksi bahan pustaka yang mendukung kebutuhan kurikulum dan minat literasi siswa, serta minimnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem layanan perpustakaan. Di samping itu, masih lemahnya pengelolaan administrasi dan dokumentasi, ketidakteraturan dalam pelaksanaan program literasi sekolah, dan belum adanya legalitas struktural yang kuat seperti surat keputusan penugasan pustakawan atau rencana kerja tahunan perpustakaan juga menjadi kendala serius yang berdampak langsung terhadap pencapaian nilai akreditasi.

Sementara itu, meskipun tiga sekolah lainnya telah memperoleh nilai akreditasi yang lebih baik, hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan pada umumnya masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pusat literasi dan pembelajaran abad ke-21. Pemanfaatan teknologi digital belum berjalan secara maksimal, pengembangan program literasi masih terbatas pada kegiatan rutin, dan belum adanya integrasi yang kuat antara perpustakaan dengan visi pembelajaran sekolah menjadi indikator bahwa pengelolaan perpustakaan masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, disusun beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Pertama, sekolah perlu melakukan transformasi paradigma terhadap fungsi perpustakaan, dari sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku menjadi pusat literasi yang inklusif, partisipatif, dan inovatif. Kedua, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi prioritas melalui penyediaan pelatihan profesional dan program sertifikasi yang relevan dengan tuntutan zaman. Ketiga, pengintegrasian teknologi informasi, seperti sistem otomasi layanan dan pengelolaan koleksi berbasis digital, perlu diintensifkan agar perpustakaan mampu menyediakan akses informasi yang cepat dan efisien. Keempat, program literasi harus dikembangkan secara lebih kontekstual dan berbasis pada kebutuhan serta minat siswa agar mampu menumbuhkan budaya baca dan berpikir kritis. Terakhir, penguatan tata kelola kelembagaan perpustakaan melalui penyusunan dokumen legal formal,

penganggaran rutin, dan sistem pelaporan kinerja yang sistematis sangat diperlukan guna menjamin keberlanjutan pengembangan perpustakaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan akreditasi perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kualitas sumber daya manusia, kebijakan internal sekolah, dan kemampuan untuk berinovasi dalam menghadirkan perpustakaan sebagai entitas strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah yang kokoh sekaligus memberikan inspirasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam membangun perpustakaan sekolah yang adaptif terhadap perubahan dan relevan dengan tuntutan pembelajaran di era digital.

Daftar Pustaka

- Ade Giantri, Sisca Nopralia, & Siti Waliah. (2023). PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MINAT BACA GURU DAN SISWA (STUDI PENELITIAN PADA SMK NEGERI 3 PALEMBANG). *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 1222–1230. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.512>
- Caroline Roche. (2018). *Making the library the true heart of the school*. <http://www.scisdata.com/connections/issue-105/making-the-library-the-true-heart-of-the-school/>
- Dinar Pustaka. (2024). *MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERSTANDAR DENGAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan*. <https://dinarpu.staka.lamongankab.go.id/posting/20487>
- Erna Hidayati. (2020). *Akreditasi Perpustakaan Sekolah, Menuju Perpustakaan Sekolah yang Berkualitas*. kumparan. <https://kumparan.com/ernahidayati102/akreditasi-perpustakaan-sekolah-menuju-perpustakaan-sekolah-yang-berkualitas-1uO8sCmUk6S>
- Krismayani, I. (2019). Analisis Kesesuaian Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Terhadap Ketentuan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 3(2), 199–205. <https://doi.org/10.14710/anuva.3.2.199-205>
- M. Reza Rokan. (2017). Manajemen perpustakaan sekolah. *Jurnal Iqra'*, 11. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/795/590>
- Neni. (2024). Setiap Sekolah Wajib Punya Perpustakaan, Baru Perpustakaan 47 Sekolah Terakreditasi. *sumateraekspres.id*. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/46921/setiap-sekolah-wajib-punya-perpustakaan-baru-perpustakaan-47-sekolah-terakreditasi>

Novitasari, Y., & Handayani, N. S. (2022). Inovasi Pustakawan Dalam Menunjang Program Akreditasi Perpustakaan Sekolah (Studi Kasus di Perpustakaan SMK Negeri 2 Nganjuk). *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/libraria.v10i1.13333>

Raya, S. (2024). 44 Persen Sekolah di Sulteng Belum Punya Perpustakaan. *Sulteng Raya*. <https://sultengraya.com/read/179443/44-persen-sekolah-di-sulteng-belum-punya-perpustakaan/>

Supriyanto. (2024). *Kebijakan Akreditasi Perpustakaan*. https://id.scribd.com/document/771399311/Kebijakan-Akreditasi-Perpustakaan-dan-Perpustakaan-Terakreditasi-Agustus-2024-edited-v2?utm_source=chatgpt.com

Syifa Azka Layalia. (2021). *Perpusnas RI Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka*. https://www.perpusnas.go.id/berita/akreditasi-perpustakaan-untuk-meningkatkan-kepuasan-pemustaka-?utm_

Wahyuni Sri, & Nurhikmahyanti Desi. (n.d.). Strategi Kepala Perpustakaan Untuk Memperoleh Akreditasi Perpustakaan Sekolah Nasional diSekolah Dasar Negeri Papar II Kabupaten Kediri. *Manajemen Perpustakaan Sekolah*.